

Nama : Zildjian Fitri

NPM : 2213031086

Mata Kuliah : Ekonomi Industri

Dosen : Dr. Pujiati, M.Pd. Drs. Nurdin, M.Si., dan Meyta Pritandari, S.Pd., M.Pd.

CASE VCLASS 8

Pertanyaan:

1. Analisislah kemungkinan penyebab kegagalan implementasi kebijakan *Making Indonesia 4.0* dalam mendorong pertumbuhan industri prioritas. Gunakan teori-teori kebijakan industri sebagai dasar analisis Anda.

Jawab:

Kebijakan Making Indonesia 4.0 menghadapi berbagai hambatan yang membuat pertumbuhan sektor industri prioritas tidak signifikan, meskipun secara konsep sudah mengikuti arah transformasi industri global. Berdasarkan teori-teori kebijakan industri, setidaknya terdapat empat penyebab utama yang menjelaskan kegagalan implementasi tersebut.

- a. Kelemahan dalam industrial targeting dan prioritas sektoral (Teori Kebijakan Industri Klasik)

Menurut teori industrial targeting, pemilihan sektor prioritas harus diikuti dengan dukungan sumber daya, insentif fiskal, dan strategi teknologi yang jelas. Namun, dalam praktiknya, Indonesia memilih lima sektor besar yang terlalu heterogen dan membutuhkan teknologi berbeda-beda, sehingga fokus kebijakan menjadi menyebar dan tidak terkonsentrasi. Bahkan di dalam masing-masing sektor, tidak ada penentuan sub-sektor spesifik yang benar-benar strategis misalnya pada elektronik tidak dipilih apakah ingin fokus pada komponen, semikonduktor, atau produk konsumen. Akibatnya, kebijakan berjalan secara luas tetapi tidak dalam, sehingga dampaknya terbatas.

- b. Keterbatasan technological capability dan kesiapan inovasi (Teori Lall & *Evolutionary Economics*)

Teori *technological capability* menyatakan bahwa negara berkembang sering gagal mengejar industri maju karena lemahnya kemampuan teknologi domestik, kapasitas R&D, dan kualitas tenaga kerja industri. Hal ini terjadi di Indonesia: mayoritas industri masih mengandalkan teknologi impor, tingkat otomasi rendah, dan kemampuan rekayasa produk dalam negeri terbatas. Industri 4.0 membutuhkan tenaga kerja yang mampu mengoperasikan IoT, *data analytics*, robotika, dan AI, tetapi pelatihan tenaga kerja nasional belum mampu mengejar kebutuhan tersebut. Akibatnya, teknologi 4.0 hanya diterapkan oleh segelintir perusahaan besar sementara mayoritas industri kecil menengah (IKM) tertinggal jauh.

- c. Kebijakan tidak selaras dengan struktur industri dan eco-system manufaktur (Teori Sistem Inovasi & *Cluster Development*)

Teori *national innovation system* menekankan pentingnya keselarasan antara pemerintah, industri, universitas, dan lembaga riset. Dalam konteks Indonesia, ekosistem inovasi masih lemah: kolaborasi riset industri rendah, universitas kurang terlibat dalam pengembangan teknologi manufaktur, dan rantai pasok industri tidak terintegrasi. Industri manufaktur Indonesia masih banyak mengimpor bahan baku, komponen, dan mesin, sehingga tidak memiliki industrial cluster yang kuat seperti Vietnam dengan elektroniknya atau Bangladesh dengan tekstilnya. Tanpa ekosistem pendukung, kebijakan industri 4.0 hanya menjadi slogan tanpa dukungan struktural.

- d. Hambatan birokrasi, regulasi, dan koordinasi kebijakan (Teori Kegagalan Pemerintah atau *Government Failure Theory*)

Kegagalan kebijakan sering terjadi bukan karena ide salah, tetapi karena implementasi buruk. *Government failure theory* menjelaskan bahwa koordinasi antarinstansi yang buruk, inkonsistensi kebijakan, dan birokrasi yang lambat dapat menghambat inovasi. Ini terlihat pada *Making Indonesia 4.0* yang melibatkan banyak Kementerian. Kemenperin, Kemendikbud, Kemenko Perekonomian, Kominfo, Lembaga Riset. Namun tanpa mekanisme koordinasi yang kuat. Banyak kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri, seperti pelatihan digital tanpa peralatan industri, atau insentif investasi yang tidak sinkron dengan standar teknologi. Ketidakpastian regulasi juga membuat investor enggan masuk.

- e. Minimnya insentif investasi dan rendahnya daya saing biaya produksi (Teori Trade-Off Kebijakan Industri)

Kebijakan industri harus mempertimbangkan struktur biaya nasional. Di Indonesia, biaya logistik tinggi, harga energi industri tidak stabil, dan pajak impor komponen relatif mahal. Menurut teori trade-off, perusahaan akan enggan mengadopsi teknologi baru jika biaya operasional terlalu tinggi. Hal ini menyebabkan perusahaan manufaktur asing lebih memilih Vietnam yang menawarkan logistik cepat, listrik murah, dan kebijakan investasi yang agresif. Hasilnya, kapasitas industri Indonesia stagnan, sementara negara pesaing justru tumbuh.

- f. Dominasi sektor berbasis komoditas dan lemahnya *industrial upgrading* (Teori Ketergantungan & *Structural Change*)

Teori structural change menjelaskan bahwa transformasi industri harus diikuti pergeseran dari sektor rendah nilai tambah menuju sektor menengah-tinggi. Indonesia masih didominasi industri komoditas (batubara, CPO, nikel mentah), sehingga sektor manufaktur kehilangan daya tarik. Karena investasi lebih mengalir ke pertambangan dan ekspor bahan mentah, sektor manufaktur kekurangan modal untuk modernisasi. Hal ini memperparah fenomena premature deindustrialization.

- 2. Bandingkan pendekatan kebijakan industri Indonesia dengan negara lain seperti Vietnam atau Korea Selatan. Apa yang membedakan efektivitas kebijakan mereka?

Jawab:

Berbeda dengan Indonesia, negara seperti Vietnam dan Korea Selatan menerapkan pendekatan kebijakan industri yang jauh lebih terarah, konsisten, dan berbasis pada penguatan fundamental. Vietnam, misalnya, berhasil menarik investasi asing dalam jumlah besar karena regulasi yang sederhana, kepastian hukum, serta strategi industrialisasi yang fokus pada integrasi rantai pasok global. Reformasi birokrasi dilakukan secara agresif sehingga investor memiliki persepsi risiko yang rendah. Selain itu, Vietnam memilih sektor unggulan secara realistis dan menyesuaikan pendidikan vokasi dengan kebutuhan industri, sehingga tenaga kerja siap masuk ke pabrik secara cepat. Sementara itu, Korea Selatan mengembangkan

industri melalui koordinasi kuat antara pemerintah dan perusahaan nasional besar (*chaebol*). Pemerintah memberikan dukungan finansial, perlindungan pasar, dan insentif ekspor, tetapi tetap menuntut peningkatan kualitas serta inovasi sebagai syarat bantuan. Kebijakan dilakukan berjenjang dan disiplin, tidak berubah-ubah dengan pergantian rezim. Berbeda dari kedua negara tersebut, Indonesia masih menghadapi regulasi yang tumpang tindih, inkonsistensi kebijakan, lemahnya riset dan inovasi, serta koordinasi antarkementerian yang kurang solid. Kondisi ini membuat efektivitas kebijakan industri nasional lebih rendah meskipun visi dan dokumennya cukup ambisius.

3. Berdasarkan hasil analisis Anda, rancanglah kebijakan industri alternatif yang lebih kontekstual untuk Indonesia agar mampu keluar dari jebakan deindustrialisasi dini. Jelaskan rasional dan instrumen kebijakan yang digunakan.

Jawab:

Indonesia membutuhkan kebijakan industri yang lebih kontekstual dan terarah untuk keluar dari kondisi deindustrialisasi dini, sehingga fokus kebijakan tidak lagi menyebar tetapi diarahkan pada sub-sektor manufaktur yang benar-benar memiliki peluang daya saing, kapasitas skala, dan efek pengganda ekonomi yang kuat. Pemerintah perlu menata ulang prioritasnya dengan memilih beberapa sub-sektor sangat spesifik di dalam sektor makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, serta kimia, lalu memberikan dukungan yang jelas dan terukur bagi setiap sub-sektor tersebut. Setiap sub-sektor harus dipetakan melalui analisis rantai nilai agar negara memahami titik kelemahan dan peluang peningkatan nilai tambah, termasuk bagaimana menghubungkan pemasok lokal, pabrik besar, pusat riset, serta pasar. Untuk memperkuat posisi manufaktur, pemerintah juga perlu mengembangkan klaster industri yang terintegrasi dengan menyediakan lahan industri, infrastruktur logistik, fasilitas uji laboratorium, pusat pelatihan, dan insentif yang mendorong perusahaan besar menggandeng UMKM lokal. Pendekatan ini harus diikuti dengan upaya membangun kemampuan teknologi dan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan vokasi berbasis industri, program peningkatan keterampilan pekerja, serta dana riset yang memungkinkan kolaborasi antara industri, universitas, dan lembaga riset. Insentif fiskal seperti tax holiday, kredit lunak, dan pengurangan pajak harus diberikan secara bersyarat, misalnya dengan mewajibkan transfer teknologi, penggunaan komponen lokal, investasi riset, atau penciptaan lapangan kerja terampil. Di sisi

lain, reformasi regulasi dan penurunan biaya logistik harus berjalan bersamaan agar industri memiliki kepastian hukum dan biaya produksi yang kompetitif. Selain itu, strategi menarik investasi asing langsung perlu diarahkan tidak hanya untuk membuka pabrik, tetapi juga untuk memperkuat kemampuan domestik melalui kewajiban bermitra dengan pemasok lokal, pelatihan tenaga kerja, serta pembangunan fasilitas riset bersama.

UMKM juga harus dilibatkan melalui program digitalisasi produksi, skema pembiayaan yang mudah diakses, serta peluang masuk ke rantai pasok perusahaan besar. Untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan serasi, diperlukan lembaga koordinasi nasional yang memantau pelaksanaan kebijakan lintas kementerian dan daerah, menetapkan indikator kinerja yang jelas seperti peningkatan nilai tambah lokal, ekspor manufaktur, dan penyerapan tenaga kerja terampil. Dengan pendekatan yang terfokus, berbasis klaster, memperkuat SDM, mendorong inovasi, serta memastikan keterlibatan UMKM dan investasi asing yang berkualitas, Indonesia berpeluang besar membangun kembali sektor manufakturnya dan bergerak menuju struktur ekonomi yang lebih kuat, modern, dan berdaya saing global dalam jangka panjang.